

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hasil sensus penduduk (SP2020) pada September 2020 tercatat jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa. Hasil tersebut mengalami kenaikan sebesar 32.56 juta jiwa dibandingkan hasil SP2010 (bps.go.id, 2020). Banyaknya penduduk dengan angka ratusan juta bagi negara berkembang merupakan angka yang sangat tinggi dan merupakan sebuah keuntungan sekaligus tantangan bagi negara dalam berupaya menyejahterakan masyarakatnya.

Kesejahteraan masyarakat merepresentasikan keberhasilan terobosan keputusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Berbagai terobosan strategi diambil sebagai pemecah masalah serta sebagai pengembali situasi. Terobosan strategi kebijakan pada dasarnya berorientasi pada masyarakat sesuai dengan salah satu tujuan negara yang tercantum pada pembukaan UUD 1945. Kebijakan yang diambil diikuti dengan implementasi berkelanjutan serta kerja sama dari berbagai aktor yang terlibat. Pemerintah, swasta, dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dan terus berkorelasi dalam keberjalanan dan keberhasilan suatu strategi kebijakan terutama dalam peningkatan pembangunan ekonomi negara.

Berbagai sektor terus diupayakan dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi. Salah satunya yaitu sektor pariwisata. Sektor pariwisata terus digenjot oleh pemerintah sebagai salah satu sektor peningkatan pembangunan ekonomi. Peningkatan aktivitas pariwisata oleh pemerintah, menurut Silanne (1994, dalam

Wardoyo dan Bahtarudin, 2003) dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu peranan minyak sebagai penghasil devisa negara semakin lama semakin berkurang, serta hal tersebut semakin ditekan dengan menurunnya nilai ekspor non migas yang mana merupakan faktor kedua yang mendasari peningkatan aktivitas pariwisata oleh pemerintah. Beralih pada faktor ketiga yaitu dari aspek wisata itu sendiri yang terlihat terus-menerus meningkat. Hal itu dibuktikan dari banyaknya peminat wisata oleh masyarakat terutama wisata berbasis alam pedesaan. Kehidupan perkotaan dengan hiruk pikuk kerja seakan memberikan tekanan sehingga manusia cenderung mencari suatu pengalihan yaitu salah satunya dengan menyambangi wisata alam pedesaan yang jauh dari suasana kota.

Indonesia sebagai negara dengan wilayah luas dan potensi geografis yang menjanjikan sudah sepatutnya dimanfaatkan sebaik mungkin. Kondisi geografis Indonesia dengan berbagai gunung dan pegunungan yang dimiliki memberikan potensi sumber daya alam melimpah dan menakjubkan. Sumber daya alam yang ada di setiap daerah Indonesia menjadi ciri khas tersendiri dan memberikan peluang menjanjikan. Peluang tersebut lah yang seharusnya dapat dikelola oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari – hari dan sebagai penyokong kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Upaya pengelolaan secara maksimal dari SDA yang dimiliki oleh suatu daerah dapat diwujudkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat setempat selaku pemilik dan sebagai pengelola secara berkelanjutan.

Pengelolaan berbasis wisata menjadi salah satu peluang yang dapat diolah dengan SDA yang dimiliki. Wisata desa saat ini sudah tidak menjadi asing di telinga

masyarakat tetapi pelaksanaannya belum benar-benar menyeluruh dan mengambil aspek yang cukup menjanjikan bagi kesejahteraan masyarakat secara ekonomi. Hal tersebut juga seharusnya berkolaborasi dengan kebiasaan yang sudah ada sebelumnya di daerah setempat tersebut sehingga dapat menumbuhkan korelasi seimbang dan selaras tanpa adanya konflik kepentingan dan perbedaan pemahaman karena seringkali adanya pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan desa wisata mendapat pertentangan dari sebagian masyarakat setempat dengan alasan merusak budaya.

Desa wisata memiliki konsep tersendiri tidak bisa disamakan dengan konsep wisata lainnya. Terdapat dua konsep utama dalam desa wisata yaitu akomodasi dan atraksi (Pratiwi, 2008). Akomodasi merupakan konsep desa wisata dengan menyediakan tempat tinggal penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk sebagai tempat tinggal wisatawan. Sedangkan atraksi adalah konsep desa wisata dengan menyuguhkan seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta pengaturan fisik lokasi desa yang memungkinkan bercampurnya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti kursus, dll. Selain itu, konsep desa wisata menurut Widi Kurniawan (2005) merupakan suatu bentuk pariwisata dengan objek dan daya tarik wisata berupa kehidupan desa dengan keistimewaan masyarakat, panorama alam, hasil budaya, sehingga dapat dijadikan komoditas bagi wisatawan. Hasil ekonomi dari desa wisata dapat menjadi salah satu peluang sumber pendapatan bagi masyarakat daerah tersebut yang mana berusaha mengelola sebagaimana mungkin potensi yang dimiliki. Berdasarkan Statistik Potensi Desa 2018, Kemendesa PDTTIndonesia

memiliki jumlah total 7.275 desa wisata yang tersebar di seluruh provinsi. Dari total tersebut, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan desa wisata terbanyak melebihi 1000 tempat (Oktari, 2021).

Desa wisata dikelola dengan berbagai upaya dan strategi yaitu pemetaan lingkungan dari segi potensi desa, pemberdayaan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi wisata dan dukungan pemerintah. Terdapat hubungan sinergis yang diciptakan oleh unsur swasta, pemerintah dan masyarakat yaitu:

- a. pemerintah sebagai fasilitator dan regulator;
- b. swasta sebagai pengembang; dan
- c. masyarakat sebagai subjek pengembang.

Dari hubungan tersebut bertujuan untuk pengembangan desa wisata tersebut. Pengembangan desa wisata menurut pasal 16 Peraturan Daerah Jateng no 2 tahun 2019 meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur desa wisata;
- b. pemasaran desa wisata;
- c. penguatan kelembagaan desa wisata; dan
- d. kerjasama kemitraan.

Dalam hal kegiatan pengembangan desa wisata disesuaikan dengan potensi yang dimiliki desa tersebut. Menurut Putra (2006), pengembangan desa wisata adalah wilayah desa yang dapat memanfaatkan unsur masyarakat desa dan berfungsi sebagai atribut produk wisata, menjadi suatu rangkaian aktivitas pariwisata yang terpadu serta memiliki tema. Potensi-potensi desa perlu digali dan

dijadikan menjadi daya tarik dari segala sisi yang ada. Salah satu potensi yang perlu digali yaitu potensi alam yang dimiliki dengan dimanfaatkan sebaik mungkin. Terlepas dari kekuatan bisnis yang diperoleh, lingkungan perlu ditata sedemikian rupa agar tidak merusak tata alam itu sendiri serta tata sosial masyarakat setempat. Menurut Januarti (2017), pengembangan potensi wisata harus dilakukan dengan melihat kondisi alam dan kondisi sosial setempat, sehingga dari hal tersebut bisa diambil dua potensi sekaligus yaitu wisata alam dan wisata buatan. Wisata alam menitikberatkan pada potensi alam yang dimiliki suatu daerah, sedangkan wisata buatan berkaitan dengan aktivitas sosial masyarakat meliputi aktivitas sehari-hari masyarakat pedesaan.

Terkait dengan pengembangan wisata, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia memiliki program pengembangan secara menyeluruh di daerah kawasan wisata Borobudur yang merupakan kawasan daerah dengan berbagai potensi alam yang dapat dimanfaatkan sebagai daya guna daerah. Program tersebut direalisasikan dengan pembentukan sebuah lembaga yaitu Badan Otorita Borobudur atau yang sering dikenal dengan BOB.

BOB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2017. BOB merupakan satuan kerja dibawah Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Pariwisata nomor 10 Tahun 2017. BOB dibentuk dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan pariwisata khususnya di kawasan Borobudur dan sekitarnya. BOB mengembangkan Zona Otorita.

Zona Otorita Badan Otorita Borobudur yaitu kawasan hutan seluas 309 hektar yang berlokasi di Perbukitan Menoreh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Zona otorita ini berjarak 35 Km dari Bandara Internasional Yogyakarta dan dapat ditempuh selama 45 menit. Kawasan tersebut berdasarkan rencana akan dikembangkan dengan konsep *culture and Adventure Eco-Tourism*, dengan mengembangkan aspek kelestarian dan keramahan pada alam. Zona Otorita tersebut akan dibangun dengan menyediakan berbagai fasilitas wisata bertaraf Internasional, seperti hotel dengan konsep *Glamorous Camping, Eco Resort, Fine Dinning Restaurant, MICE*, dan didukung dengan kawasan di sekitarnya yang sudah mulai berkembang, sehingga dapat meningkatkan nilai investasi di Zona Otorita Badan Otorita Borobudur ([bob.kemenparekraf.go.id](http://bob.kemenparekraf.go.id)).

Cakupan BOB daerah Purworejo salah satunya yaitu Desa Benowo. Desa Benowo, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo memiliki potensi alam yang sangat menjanjikan untuk dimanfaatkan. Selain alam, budaya religi dan kuliner juga dapat ditemukan di Desa Benowo ini. Dari potensi tersebut dapat dikatakan bahwa Desa Benowo memiliki paket yang cukup lengkap menjadi salah satu desa wisata. Pada tahun 2017, Desa Benowo sudah beralih menjadi desa wisata. Perubahan tersebut ditilik dari perkembangan potensi alam yang ada yaitu gunung kunir dan curug. Daya tarik wisata alam tersebut mulai ramai sejak tahun 2016 hingga tahun 2017. Pengunjung dikisarkan hingga ribuan pada kala itu. Kuliner tradisional dan kopi khas benowo juga menjadi salah satu poin daya tarik lainnya. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Purworejo memutuskan untuk menjadikan Desa Benowo menjadi Desa Wisata pada tahun 2017 tersebut. Akan tetapi, peralihan

tersebut tidak diikuti dengan sosialisasi, pelatihan, dan lainnya, yang mana hal tersebut merupakan salah satu penyokong dasar pengembangan suatu desa wisata. Peran utama masyarakat tidak bisa dilupakan, pemerintah tidak hanya bekerja sendiri tanpa adanya campur tangan masyarakat yang mana pada dasarnya merupakan aktor utama dari proses dan hasil keberhasilan nantinya. Akibat dari hal tersebut terbukti dengan adanya penurunan pengunjung yang pada awalnya mencapai ribuan menjadi lambat laun menurun. Tidak adanya inovasi, wisata yang cenderung monoton memberikan kepuasan satu kali pada pengunjung dan memberikan kesan untuk tidak kembali menikmati wisata monoton tersebut. Pola pikir pengunjung yang seperti itu telah mematikan keberlangsungan pengelolaan wisata. Hal tersebut diperparah dengan tidak didukungnya akses jalan yang memadai dan disinyalir sudah ada beberapa kasus kecelakaan akibat infrastruktur yang tidak memadai.

Desa wisata yang kurang dikelola dengan konsep yang benar dan strategis mengakibatkan tidak adanya perkembangan di dalamnya terlepas dari banyaknya potensi yang ada. Uniknya, Desa Wisata Benowo ini mendapatkan SK Desa Wisata pada tahun 2019, selang 2 tahun dari penobatan awal di tahun 2017. SK tersebut turun ketika ketenaran wisata benowo menurun drastis. Setelah penurunan SK tersebut, pelatihan dan pengelolaan manajemen wisata benowo mulai digagas secara mendasar. Perencanaan tersebut tetapi terhalang oleh masa pandemi corona yang menyebar di Indonesia. Sehingga, pada tahun 2021 rencana tersebut baru mulai digagas kembali. Pengelolaan pengembangan desa wisata ini bekerja sama

dengan Badan Otoritas Borobudur yang mencakup potensi alam dan bisnis berupa *homestay* dan penunjang pariwisata lainnya.

Pengelolaan pengembangan desa diperlukan hubungan kerja pemerintah terkecil dan terdekat yaitu pemerintah desa sebagai penunjang administrasi dan pelaku wisata di dalamnya. Peran setiap aktor yang terlibat sangat diperlukan sesuai dengan tugas dan saling berkoordinasi. Hal tersebut jika tidak dilakukan secara matang dapat menjadi salah satu hambatan dalam proses pengelolaan dan pengembangan desa wisata ini terlebih dalam pendekatan dan penggerakan masyarakat.

Pemilihan dan pengelolaan konsep desa wisata diperlukan koordinasi dengan masyarakat sebagai aktor utamanya. Dalam hal ini, diperlukan adanya pendekatan dan penggerakan masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Menurut Maarif (2021), konsep pemberdayaan pada dasarnya merupakan transfer kekuasaan pada kelompok masyarakat, untuk menjadikan mereka lebih produktif dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang produktif melalui penguatan modal sosial. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat juga termasuk konsep pembangunan ekonomi yang berisi nilai-nilai sosial. Pemberdayaan masyarakat sebagai optimalisasi potensi wisata diharapkan memberikan modal dalam pengelolaan wisata yang akan diwujudkan nantinya. Masyarakat dibentuk untuk mandiri, berdaya dan tidak bergantung sepenuhnya pada program pemberian (*charity*) dalam jangka waktu yang berkesinambungan (Oka Prasiasa, 2017).

Berkaitan pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan dari segi kerja sama atau kemitraan antar aktor yang terlibat. Hubungan organisasional dengan bentuk hubungan kemitraan menurut adalah bentuk hubungan dengan pihak pertama dan kedua setara yang mana kedua pihak tersebut saling bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Dilihat dari berbagai temuan unik dan permasalahan yang ada, menarik untuk dilihat dan lebih digali mengenai peran setiap *stakeholder* dalam pengembangan yang diambil. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil fokus mengenai bagaimana peran multi *stakeholder* dalam pengembangan kemitraan Desa Wisata Benowo. Pemilihan topik dikarenakan kompleksitas menarik yang ditemukan dari segi peran kemitraan dan dampak pandemi COVID-19.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pembagian peran (*role player*) dilakukan oleh para *stakeholder* dan pelaku wisata?
2. Bagaimana pola kerja sama kemitraan antar *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Benowo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan kemitraan dengan fokus peran multi *stakeholder*, pola kerja sama antar *stakeholder* dan dampak COVID-19 dalam pengelolaan Desa Wisata Benowo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian serupa dan dapat memberi sumbangan bagi kajian studi desa wisata di Indonesia, khususnya dalam pengembangan desa wisata dalam masa pandemi COVID-19 saat ini dengan menganalisis peran multi *stakeholder* dan hubungan kerja sama kemitraan antar *stakeholder*.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat mengulik berbagai strategi yang sudah ditempuh dan akan ditempuh dalam pelaksanaan pengembangan Desa Wisata Benowo. Hubungan kerja sama kemitraan, pembagian peran *stakeholder*, serta capaian pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 perlu difokuskan guna mendapatkan suatu temuan menarik yang dapat berguna dalam studi peneliti.
- b. Bagi perguruan tinggi, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian penelitian mengenai hubungan kerja sama kemitraan dalam tata kelola pemerintahan terkait dengan pengembangan desa wisata serta sejauh mana pengaruh pandemi COVID-19 dalam pelaksanaannya.
- c. Bagi pemerintah Desa Benowo, penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengukur dan menganalisis tingkat peran antar *stakeholder* dalam pelaksanaan pencapaian dari kegiatan yang telah

dilaksanakan. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pengembangan dengan kerja sama selanjutnya.

- d. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pentingnya kerja sama dalam pengembangan desa wisata yang nantinya akan berimplikasi secara langsung pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Hubungan para *stakeholder* terutama masyarakat menjadi sebuah kunci penting dalam keberhasilan dan keberjalanan.

### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Dalam menjawab masalah-masalah dan mencapai tujuan dalam penelitian diperlukan tinjauan penelitian terdahulu untuk mendapatkan kerangka konsep guna mempermudah proses memperoleh hasil penelitian. Berikut tinjauan penelitian terdahulu penelitian ini.

Penelitian oleh Nida Ulfa, Muhammad Adnan, dan Ahmad Taufiq (2018) yang berjudul “Kerjasama Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Kaligono Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo”. Sesuai dengan judulnya, penelitian ini berfokus dan bertujuan mendeskripsikan kemitraan kerja sama Pemerintah Kabupaten Purworejo dan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kaligono. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang terjalin antara masyarakat dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Purworejo tidak optimal. Kerja sama antara keduanya

tidak memiliki MOU yang seharusnya disepakati oleh kedua belah pihak serta kerja sama tersebut hanya terwujud dalam bentuk pelatihan dan pembinaan tanpa menyentuh kerja sama dalam konteks perbaikan fasilitas obyek wisata. Penelitian ini juga menemukan bahwa hasil kerja sama antara masyarakat dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat tidak memberikan dampak positif yang dirasakan oleh warga setempat. Uniknya, dampak positif seperti peningkatan perekonomian masyarakat, terciptanya lapangan pekerjaan dan kelestarian lingkungan hidup yang dirasakan masyarakat malah muncul dari tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat sekitar dalam proses pengembangan desa wisata bukan dari hasil kerja sama masyarakat dan pemerintah tersebut.

Penelitian oleh Yuliana Isnaningtyas dan Neny Marlina (2017) yang berjudul “Analisis Kemitraan Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”. Penelitian tersebut bertujuan dalam menganalisis kemitraan pengelolaan Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam kepada informan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Pemerintah Kelurahan Kandri, Kelompok Sadar Wisata Pandanaran dan Sukomakmur, dan masyarakat desa wisata Kandri. Dari data informasi dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Pokdarwis Pandanaran merupakan kelompok sentral yang sangat berpengaruh dalam pengembangan dan kemajuan Desa Wisata Kandri tersebut. Selain itu juga ditemukan jenis kemitraan yang ada di Desa Wisata Kandri

merupakan jenis kemitraan semu (*pseudo partnership*) dimana kemitraan tersebut terlihat seperti biasa dan belum berkelanjutan.

Penelitian oleh Ami Suswandi Putra (2013) yang berjudul “Pola Kemitraan Pariwisata Dalam Manajemen Atraksi Desa Wisata Pampang Kota Samarinda”. Penelitian ini menguak bagaimana pola kemitraan dalam manajemen atraksi desa wisata yang tidak memberikan ekspektasi realita yang diharapkan dalam 20 tahun terakhir. Manajemen atraksi kurang memberikan ruang pengembangan SDM, terlalu membatasi aktivitas pariwisata dengan sosial budaya masyarakat, kurang memanfaatkan teknologi dan minim pengorganisasian komunitas. Hasil penelitian didapatkan bahwa model kemitraan desa wisata ini tergolong dalam kemitraan semu dan gabungan subordinatif yang mana pola kemitraan didominasi oleh pola yang bersifat bantuan.

Penelitian oleh Fitri Handayani dan Hardi Warsono (2017) yang berjudul “Analisis Peran *Stakeholders* Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis *stakeholders* dengan memetakan *stakeholders* berdasarkan pengaruh dan kepentingannya, menguraikan peran masing-masing *stakeholders* dalam usaha mengembangkan objek wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi para *stakeholders* dalam usaha mengembangkan objek wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kerjasama *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe bersifat sukarela dan kemitraan

mutualistik. Para aktor yang bermitra kedua belah pihak mendapatkan keuntungan kegiatan kerjasama yang dilakukan. Faktor-faktor yang menghambat para *stakeholders* dalam upaya mengembangkan objek wisata pantai karang jahe ialah lahan, anggaran, sumber daya manusia, pola pikir, regulasi, promosi pariwisata, dan kerjasama antar *stakeholders*.

## **1.6 Kerangka Teori**

### **1.6.1 Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)**

*Stakeholder* merupakan semua kelompok yang memiliki peran dalam keberhasilan perusahaan dalam mencapai target atau tujuan yang ingin dicapai (Kasali dalam Wibisono, 2007). Oleh karena itu dalam konteks penelitian ini, *stakeholder* merupakan aktor-aktor yang memiliki peran dalam kegiatan pengembangan Desa Wisata Benowo untuk mencapai tujuan dan hasil sesuai perencanaan. Setiap aktor memiliki peran dan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kepentingan masing-masing yang direalisasikan bersama membentuk kemitraan. Dalam prosesnya, setiap aktor sebagai *stakeholder* dibedakan kembali sesuai dengan dampak dan kekuasaan yang dimiliki.

*Stakeholder* dibagi menjadi tiga kelompok (Maryono et al.2005) dalam penelitian (Yosevita: 25), antara lain:

#### a. *Stakeholder* primer

*Stakeholder* primer merupakan *stakeholder* yang secara langsung mendapatkan dampak dari suatu rencana baik positif maupun negatif serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut.

*Stakeholder* primer memiliki pengaruh dan kepentingan dan harus dilibatkan penuh dalam tahapan-tahapan kegiatan yang direncanakan.

b. *Stakeholder* kunci

*Stakeholder* kunci merupakan *stakeholder* yang memiliki kewenangan legal dalam pengambilan keputusan. Berkaitan dalam penelitian ini *stakeholder* kunci adalah *stakeholder* yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata Kabupaten Purworejo.

c. *Stakeholder* sekunder atau pendukung

*Stakeholder* pendukung merupakan *stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan langsung tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan. *Stakeholder* pendukung berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan menjadi fasilitator dalam proses pengembangan suatu kegiatan. *Stakeholder* pendukung meliputi para investor atau pihak swasta, LSM, peneliti dan lain sebagainya yang memiliki peran sebagai pendukung dalam kegiatan.

### **1.6.2 Peran**

Teori peran (Role Theory) mendefinisikan peran adalah perpaduan antara berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu (Najoan dkk, 2017). Peran menurut Soekanto (2002) adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai yang telah ditetapkan. Dari pendapat-pendapat tersebut peneliti dapat simpulkan peran adalah sebuah aktivitas atau tindakan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh suatu individu atau

kelompok sebagai perwujudan hak dan kewajiban yang dimiliki guna mencapai tujuan output yang diharapkan dari suatu kegiatan atau program.

Dalam pengembangan suatu program atau kegiatan, dibutuhkan peran antar aktor yang terlibat. Tidak hanya dalam pelaksanaan saja, namun juga dalam perencanaan awal hingga output akhir serta pengelolaan perkembangannya. *Stakeholder* dalam pembangunan atau pengembangan suatu program memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan kekuasaan dan kepentingannya. Ada tujuan yang berbeda-beda pada akhirnya terutama jika berhubungan dengan swasta yang pastinya mencari keuntungan perusahaan. Namun, tetap dengan tujuan yang sama pada akhir yaitu memajukan dan mengembangkan program yang dibangun untuk mendapatkan output yang diinginkan.

Peran multi *stakeholder* yang terlibat dapat didudukkan dengan berbagai macam peran. Menurut Nugroho (2014) dalam penelitian Ali dkk, *stakeholder* dalam program pembangunan diklasifikasikan berdasarkan peranannya, antara lain:

a. *Policy creator*

*Policy creator* sesuai dengan namanya merupakan salah satu peran *stakeholder* sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan. *Stakeholder* dengan peran *policy creator* memiliki pengaruh paling utama dalam penentu arah awal mana yang membutuhkan pembangunan atau

perkembangan. Dengan peran ini *stakeholder* tersebut membuat kebijakan atau peraturan berkaitan dengan peraturan wisata.

b. Koordinator

Dalam peran koordinator, *stakeholder* memiliki peran mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat dalam kegiatan. Koordinasi dalam konteks peran *stakeholder* adalah bagaimana mengelola relasi dan interaksi antar *stakeholder* guna mencapai tujuan serta menyeimbangkan kepentingan masing-masing pihak sehingga akan meminimalisir munculnya konflik (Freeman, 1984). *Stakeholder* bisa dikategorikan memiliki peran sebagai koordinator jika mereka berinteraksi dan berkomunikasi dalam hal arahan pengelolaan program atau kegiatan bersama dengan pihak-pihak lain yang terlibat. Koordinasi dilakukan untuk mencapai keselarasan informasi dan sebagai salah satu forum diskusi antar *stakeholder* sehingga dapat bersama melakukan pengembangan program sesuai tujuan output yang diinginkan secara efisien, efektif, dan tanpa konflik berarti.

c. Fasilitator

Sebagai fasilitator, *stakeholder* memiliki peran untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan kelompok sasaran. Kebutuhan dalam pengembangan suatu program tidak dapat dipenuhi hanya dengan satu aktor atau *stakeholder* saja, namun juga bisa dipenuhi oleh *stakeholder* lain. Satu *stakeholder* bisa hanya memiliki peran sebagai fasilitator saja sesuai cakupannya. *Stakeholder* bisa dikategorikan sebagai fasilitator dalam suatu program atau kegiatan jika berperan aktif dalam memberikan

penunjang kebutuhan kegiatan. Penunjang kebutuhan dapat berupa fasilitas fisik ataupun non-fisik seperti jasa atau tenaga.

d. *Implementer*

Sesuai dengan namanya, *implementer* adalah peran *stakeholder* sebagai pelaksana kebijakan yang di dalamnya juga termasuk kelompok sasaran. Dalam peran ini, *stakeholder* melaksanakan atau mengeksekusi segala rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Kelompok sasaran atau dalam penelitian ini yaitu masyarakat juga dapat termasuk *stakeholder* dengan peran *implementer* karena segala rencana yang terealisasi pastinya akan dilaksanakan dan diteruskan oleh kelompok yang dijadikan saran dalam program atau kegiatan.

e. Akselerator

*Stakeholder* yang memiliki peran mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran baik dilihat dari segi waktu ataupun tujuan. Dalam peran ini *stakeholder* juga dapat disebut sebagai pengarah dan pengevaluasi kegiatan. Peran ini terkadang tidak dimiliki secara pasti oleh siapa namun bisa mengalir sejalan kegiatan.

### **1.6.3 Pola Kemitraan**

Pola kemitraan bertujuan untuk menggabungkan sumber daya, pengetahuan, dan keahlian dari berbagai aktor untuk mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan masing-masing pihak atau *stakeholder* bekerja secara individu. Pola kemitraan yang efektif memerlukan komunikasi yang baik, transparansi, dan pemahaman bersama tentang tujuan, tanggung jawab, dan

manfaat yang diharapkan dari kemitraan. Ada berbagai macam pemahaman mengenai arti spesifik dari pola itu sendiri. Perlu dipahami bahwa pola memiliki pemahaman dan pandangan berbeda bergantung dari bidang dan konteks ilmu tertentu. Secara umum, pola merupakan model dari suatu rangkaian kerja sama beberapa aktor atau *stakeholder* yang berpengaruh untuk mencapai tujuan.

Menurut Koentjaraningrat (2005), pola dalam antropologi sosial mengacu pada “tatanan yang mengungkapkan hubungan antar unsur masyarakat”. Pola ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dalam masyarakat, seperti struktur sosial, norma, nilai budaya, dan interaksi sosial. Interaksi sosial dalam penelitian ini merujuk pada hubungan atau relasi antar aktor dalam pengembangan desa wisata dimana membentuk pola atau rangkaian kerja.

Menurut Sulistiyani (2004:130-131) terdapat model kemitraan yang mampu menggambarkan hubungan antarorganisasi berdasarkan kesadaran para pelaku, yaitu:

1) *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu

Pola kemitraan semu adalah merupakan sebuah pola kemitraan antara dua pihak atau lebih. Namun antar *stakeholder* tidak sesungguhnya melakukan kerja sama secara seimbang. Pada lain sisi suatu pihak kemungkinan belum sepenuhnya memahami arti dari persekutuan yang dibentuk, dan untuk tujuan apa. Terdapat hal unik dari kerja sama ini yaitu

kedua belah pihak atau lebih merasa perlu untuk bekerjasama, tetapi para mitra belum tentu mengerti hakikat apa yang diperjuangkan dan apa kepentingannya.

Dapat disimpulkan dan didudukan kembali bahwa dalam kemitraan ini, para *stakeholder* mendapatkan manfaat dari pengembangan pariwisata tanpa memberikan dampak signifikan pada pihak lain. *Stakeholder* mendapat manfaat dari peningkatan pariwisata tanpa memberikan kontribusi aktif pada pembangunan desa wisata. Pola relasi tersebut dapat dilihat dalam proses pengembangan suatu kegiatan atau program, sama halnya dengan program pengembangan desa wisata. Tidak semua *stakeholder* memiliki peran aktif namun juga mendapat manfaat dari desa wisata. Diperlukan analisis mengenai para *stakeholder* yang memiliki kontribusi aktif dan tidak sehingga menemukan pola kemitraan ini.

## 2) *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik.

Pola kemitraan yang kedua yaitu kemitraan mutualistik. Kemitraan ini adalah merupakan pola kemitraan antar dua pihak atau lebih yang saling menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan. Aspek tersebut yaitu untuk saling memberikan manfaat serta saling mendapatkan manfaat lebih dari kemitraan tersebut, sehingga diharapkan akan dapat mencapai tujuan secara optimal.

Dalam pengembangan desa wisata, kemitraan mutualistik mencerminkan hubungan simbiosis yang saling menguntungkan antara berbagai pihak. Para *stakeholder* memberikan kontribusi positif satu sama

lain dalam kegiatan pengembangan desa wisata. Kontribusi positif tersebut dapat berupa peran aktif para *stakeholder* seperti halnya, memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada kelompok sasaran dimana pelatihan tersebut secara langsung memberi manfaat kepada kelompok sasaran tersebut, namun juga di lain sisi memberikan manfaat pada si pemberi pelatihan dengan tujuan yang terlaksana dan output yang dihasilkan. Dapat didudukan secara lebih detail bahwa kemitraan mutualistik dalam pengembangan desa wisata dapat dilihat dari kontribusi antar *stakeholder* dalam mengembangkan infrastruktur, pelatihan, atau promosi desa wisata.

3) *Conjugation partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan.

Kemitraan konjugasi adalah pola kemitraan untuk mendapatkan energi bersama dari para aktor mitra dan kemudian saling terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Kemitraan konjugasi dapat merujuk pada pertukaran pengetahuan, keterampilan atau sumber daya antara pemangku kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, organisasi, agen, kelompok atau individu yang memiliki kelemahan dalam menjalankan bisnis atau mencapai tujuan organisasi dapat mengadopsi model kerjasama ini. Dua pihak atau lebih dapat bergabung atau melakukan konjugasi untuk meningkatkan kemampuan satu sama lain.

## 1.7 OPERASIONALISASI KONSEP

Operasionalisasi konsep adalah proses mereduksi konsep penelitian menjadi bagian-bagian yang mudah dipahami dan diukur. Setiap konsep penelitian harus menemukan definisi operasionalnya, yaitu menyusun konsep menjadi bagian/dimensi yang lebih rinci sehingga dapat diukur (Ismail, 2015).

Penelitian Peran Multi *Stakeholder* Dalam Pengembangan Desa Wisata di masa pandemi COVID-19 di Desa Benowo, Kabupaten Purworejo ini memiliki fokus penelitian pengembangan desa wisata berupa peran *stakeholder* dalam kerja sama kemitraan periode 2021 hingga 2022. Pengembangan kerja sama kemitraan merupakan salah satu unsur pengembangan desa wisata menurut pasal 16 Peraturan Daerah Jateng no 2 tahun 2019.

Berikut konsep variabel yang dioperasionalkan:

### 1. *Stakeholder*

*Stakeholder-stakeholder* dalam kegiatan pengembangan Desa Wisata Benowo diidentifikasi menjadi tiga kriteria *stakeholder* sesuai dengan teori penelitian Maryono dalam Yosevita (2015).

#### a. *Stakeholder* primer

- Masyarakat (Pokdarwis)

#### b. *Stakeholder* kunci

- BOB
- Dinporapar
- Pemerintah Desa

c. *Stakeholder* Sekunder

- TNI
- Perhutani

2. Peran *Stakeholder*

*Stakeholder-stakeholder* yang telah diidentifikasi berperan dalam kegiatan pengembangan desa wisata kemudian dianalisis dengan berfokus pada klasifikasi peran *stakeholder* menurut Nugroho dalam penelitian Ali dkk. (2014). Berikut klasifikasi peran *stakeholder* dalam suatu program pembangunan atau pengembangan: (a) *Policy creator*; (b) Koordinator; (c) Fasilitator; (d) *Implementer*; dan (e) Akselerator.

3. Pola kerja sama kemitraan

Dalam hubungan kemitraan antar *stakeholder* menimbulkan kerja sama atau kemitraan yang terpola. Pola kemitraan *stakeholder* didudukkan menjadi tiga sesuai dengan penelitian Sulistyani (2004).

- a. Kemitraan semu
- b. Kemitraan mutualistik
- c. Kemitraan konjugasi

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Desain Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkap keseluruhan gejala secara holistik kontekstual dengan mengumpulkan data dari latar alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode deskriptif ini, penulis melaksanakan serangkaian prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan data dan fakta serta fenomena kemudian dianalisis, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dalam bahasa dan kesimpulan.

### **1.8.2 Situs dan Subjek Penelitian**

Pengembangan pariwisata kerakyatan atau pedesaan menurut Antara dan Arida (2015) dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu swadaya (sepenuhnya dari masyarakat), kemitraan, dan pendampingan oleh LSM atau pihak perguruan tinggi selama masyarakat dianggap belum mampu untuk mandiri. Dalam pengembangan Desa Wisata Benowo dilakukan dengan cara kemitraan dengan beberapa pihak tidak hanya dari masyarakat setempat saja. Oleh karena itu ditemukan beberapa *stakeholder-stakeholder* yang berpengaruh dalam pengembangan desa wisata ini.

Penelitian dilakukan dengan mengambil fokus pengembangan kerja sama kemitraan Desa Wisata Benowo, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Subjek penelitian yakni informan ataupun narasumber

dimana merupakan bagian penting dari penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini merupakan *stakeholder-stakeholder* yang memiliki peran dalam pengembangan Desa Wisata Benowo dalam rentang masa pandemi COVID-19.

Setiap aktor dibagi menjadi tiga kriteria *stakeholder*. Menurut Maryono dalam penelitiannya (Yosevita: 25), *stakeholder* dalam pembangunan wisata dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu *stakeholder* primer, *stakeholder* kunci dan *stakeholder* sekunder. Pengembangan Desa Wisata Benowo didasari oleh pengaruh dari *stakeholder-stakeholder* sebagai berikut:

a) *Stakeholder* Primer

- Masyarakat Desa Benowo (Pokdarwis)

*Stakeholder* ini merupakan *stakeholder* yang memiliki pengaruh penting dan harus dilibatkan langsung dalam setiap tahapnya. *Stakeholder* primer juga merupakan *stakeholder* yang mendapatkan dampak langsung dari adanya wisata tersebut baik secara positif maupun negatif. Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam pengembangan desa wisata ini, aktor yang memegang peranan sebagai *stakeholder* primer yaitu masyarakat Desa Benowo. Dengan adanya desa wisata ini masyarakat secara langsung mendapatkan dampak dan manfaat dari segala tahapnya serta menjadi aktor utama dalam setiap proses pengembangannya. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya wisata ini juga menjadi momen peluang bagi masyarakat yang didapat dari kerja sama antar masyarakat itu sendiri.

Peran masyarakat dalam konteks pengembangan desa wisata perlu dipahami dengan adanya kesamaan pola pikir maupun pola tindak dari

masyarakat pedesaan mengenai potensi wisata yang ada di desa kemudian bersama-sama mewujudkan pengembangan pariwisata untuk mampu memberikan dampak positif bagi mereka dengan menunjukkan kultural unik yang dimiliki (Herdiana, 2018). Oleh karena itu, peran masyarakat dengan adanya kesadaran dan semangat sangat dibutuhkan bagi pengembangan yang sedang dan akan dijalankan.

b) *Stakeholder* Kunci

Ada tiga *stakeholder* kunci dalam pengembangan kemitraan Desa Wisata Benowo dimana merupakan *stakeholder* yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengembangan. Berikut tiga *stakeholder* kunci yang peneliti ambil sebagai subjek penelitian: (a) Badan Otorita Borobudur (BOB); (b) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo; (c) Pemerintah Desa.

c) *Stakeholder* Sekunder

Pengembangan desa wisata membutuhkan *stakeholder* yang berperan sebagai penunjang pengembangan. *Stakeholder* ini tidak memiliki kepentingan langsung terhadap rencana desa wisata namun memiliki kepedulian yang besar dalam proses pengembangan. Desa Wisata Benowo dalam pengembangannya melibatkan beberapa aktor yang berperan sebagai *stakeholder* sekunder yaitu: (a) Pihak keamanan (TNI); (b) Perhutani.

### **1.8.3 Jenis dan Sumber Data**

Pada penelitian ini, terdapat dua sumber data yang akan diperoleh dan digunakan, yakni data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data

yang berasal dari sumber asli atau pertama, baik dalam bentuk terkompilasi ataupun bentuk file, dimana data ini harus dicari langsung pada seorang yang berkaitan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara pada seseorang yang memiliki andil langsung dalam proses strategi pengembangan potensi pariwisata Desa Benowo. Selain itu, juga dibutuhkan wawancara langsung dengan anggota Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dari narasumber tetapi merupakan data yang diperoleh oleh orang lain. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal atau dokumen dari penelitian terdahulu yang menunjang data yang belum terpenuhi dalam penelitian ini.

#### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti: wawancara, observasi, dokumentasi, pencarian dokumen dan penelusuran data online.

##### **1.8.4.1 Wawancara**

Pada penelitian ini, teknik wawancara dilakukan pada seseorang yang memiliki andil langsung dalam proses strategi pengembangan kemitraan potensi pariwisata Desa Benowo. Wawancara dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana situasi dan kondisi Desa Wisata Benowo yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dengan wawancara dilakukan kepada kelompok utama yang peneliti pilih. Teknik wawancara semi terstruktur sebagaimana penjelasan Sugiyono (2019) merupakan suatu teknik wawancara yang tidak melulu mengikuti pedoman wawancara yang sudah dibuat melainkan juga mencari pendapat dan ide-ide dari sang informan.

Dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan tolak ukur karakteristik atau kriteria sesuai dengan judul penelitian dan tujuan penelitian. Menurut Martha dan Kresno (2016), ada beberapa kriteria dalam menentukan informan pada penelitian kualitatif yaitu,

1. Harus menjadi peserta aktif dalam kelompok, organisasi, atau budaya yang diteliti, atau telah melalui tahap enkulturasi;
2. Harus terlibat dalam budaya yang diteliti “saat ini”. Penekanan “saat ini” sangat penting, karena jangan sampai informan kunci lupa dengan masalah yang akan diteliti;
3. Harus memiliki waktu yang memadai. Informan kunci tidak cukup hanya memiliki kemauan, namun dapat memberikan informasi kapanpun saat dibutuhkan;
4. Harus menyampaikan informasi dengan bahasa sendiri (natural). Sebaiknya informan yang menyampaikan informasi dengan “bahasa analitik” dihindari karena informasi yang dihasilkan sudah tidak natural.

Kriteria pemilihan informan peneliti tuangkan sesuai dengan teori tersebut serta, peneliti menggunakan tolak ukur karakteristik atau kriteria sesuai dengan judul penelitian dan tujuan penelitian. Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Menjadi anggota atau bagian dari instansi atau organisasi terkait kemitraan dengan program pengembangan Desa Wisata Benowo.
2. Terlibat dalam proses pengembangan desa wisata
3. Memiliki waktu yang cukup dan berkenan untuk diwawancara

Dari kriteria tersebut, peneliti berusaha menentukan informan yang sesuai dan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Dalam menentukan berapa jumlah informan, disesuaikan dengan dua asas atau syarat dalam menentukan jumlah informan yaitu asas kecukupan dan kesesuaian data (Martha & Kresno, 2016). Asas kecukupan bertolak pada sudah terjawabnya pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan dan sudah mencapai kedalaman informasi yang diinginkan peneliti. Artinya bahwa jika dari berapa informan saja sudah cukup mewakili jawaban, maka jumlah informan sudah dicukupkan dan dinilai sudah terwakilkan. Asas kesesuaian memiliki makna bahwa informan yang dipilih harus memiliki kesesuaian dengan kehendak maksud dari penelitian dan dapat menjawab secara jelas tidak menimbulkan perbedaan jawaban antara informan satu dan yang lainnya yang mana dapat menimbulkan kerancuan dan pertanyaan kesesuaian data tersebut.

Berikut batasan informan yang sesuai dengan kriteria dan asas penentuan jumlah informan:

- a) Masyarakat desa (pokdarwis), dalam hal ini diwakili oleh Ketua Pokdarwis Desa Benowo, Bapak Pujiono. Ketua pokdarwis dipilih sebagai perwakilan pengelola wisata oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi bagaimana hubungan kemitraan dari *bottom ke up*.
- b) Pemerintah Desa Benowo, dalam hal ini diwakili oleh Kaur Perencanaan Desa Benowo, Bapak Musthofa. Kaur perencanaan dipilih untuk mendapatkan informasi mengenai data perencanaan desa dan kondisi dalam hubungan membangun desa serta MOU kerja sama.
- c) Dinas Pariwisata Kabupaten Purworejo, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Promosi, Endah Hanna Rosanti. Bidang promosi bertugas dalam branding desa wisata yang meliputi dari pelatihan-pelatihan dan koordinasi.
- d) Badan Otorita Borobudur (BOB), dalam hal ini diwakili oleh Direktur utama Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata, Bapak Bisma Atmika.
- e) TNI, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Rahmat Hariman selaku Anggota KODIM yang berkontribusi dalam kegiatan TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) di Desa Benowo.

f) Ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Desa Benowo, Bapak Fauzi. Dalam hal ini Beliau mewakili pihak perhutani untuk menjawab mengenai kerja sama lahan perhutani sebagai lahan wisata Desa Benowo.

#### **1.8.4.2 Observasi**

Penelitian ini akan mengobservasi peran multi *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Benowo berkaitan kemitraan yang dijalankan terutama dalam masa pandemi COVID-19 sebagai tantangan. Peneliti melaksanakan observasi lapangan langsung ke objek penelitian yaitu Desa Wisata Benowo. Dalam tahap observasi ini peneliti mendapatkan tantangan pada akses jalan untuk ke objek observasi, terlebih ketika peneliti mencoba langsung ke objek wisata alam gunung kunir. Akses jalan cukup sulit bagi peneliti sehingga membutuhkan waktu dan keberanian tersendiri bagi peneliti untuk melewati jalan tersebut. Peneliti juga berkunjung langsung ke beberapa lembaga yang berkaitan langsung sebagai *stakeholder* pengembangan desa wisata ini diantaranya, Dinporapar Purworejo dan Badan Otorita Borobudur (BOB) yang terletak di Yogyakarta.

#### **1.8.4.3 Dokumentasi**

Informasi penelitian juga diperoleh melalui arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya yang berkaitan dengan fakta ilmiah. Data berupa dokumen digunakan untuk menggali informasi yang terjadi sebelumnya. Selain itu juga menjadi bukti pendukung kegiatan.

Ada beberapa hasil rapat dan kegiatan yang peneliti dapatkan sebagai pendukung data penelitian. Selain itu, peneliti mendapatkan

beberapa arsip foto kegiatan yang peneliti dapatkan secara langsung ketika observasi maupun arsip data yang sudah ada.

### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu gambaran secara komprehensif tentang analisis peran multi *stakeholder* dalam pengembangan kemitraan desa wisata pada masa pandemi COVID-19 di Desa Benowo Kabupaten Purworejo dengan analisis peran multi *stakeholder* yang terlibat dan relasi pola kemitraan *stakeholder*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif yaitu mendeskripsikan hasil temuan dengan menggunakan teori sebagai dasar, mengklasifikasikannya dalam bentuk naratif, mengolahnya secara ringkas dan sistematis, kemudian menarik kesimpulan.

#### **1.8.5.1 Reduksi Data**

Mereduksi data sebagai bagian analisis di mana mempertajam, mengelompokkan, pengarahannya, pembuangan yang tidak dibutuhkan serta terorganisirnya data agar simpulan bisa diambil serta dilakukan verifikasi. Peneliti melakukan reduksi dalam meringkas inti data yang ditemukan dan kemudian difokuskan pada ke hal-hal penting saja.

#### **1.8.5.2 Penyajian Data**

Tahap setelahnya yakni menyajikan dimana sebagai aktivitas yang memiliki esensi setelah mereduksi pada jenis kualitatif. Pada tahap ini

peneliti menyajikan kumpulan info dengan susunan serta untuk mengambil suatu simpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan.

#### **1.8.5.3 Kesimpulan**

Setelah aktivitas mengumpulkan data telah selesai, dilanjutkan mengetahui pengertian dari produk-produk, pencatatan aturan-aturan, bentuk, alasan, hubungan-hubungan, penyebab dan apa yang diakibatkan, serta tambahan lainnya. Simpulan yang pada awalnya masih samar mengalami peningkatan semakin rinci. Hal terakhir yang dilakukan peneliti dalam tahapan ini yakni menarik kesimpulan berdasarkan apa yang sudah didapatkan sebelum-sebelumnya.